

ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2021 -2023

Deasy Femayona Devi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas AI - Khairiyah

Corresponding author : deasy.eci2@gmail.com

Abstract

The Budget Realization Report (LRA) is one of the most essential financial accountability reports. It is the first type of financial report prepared before the balance sheet, operational report, and cash flow statement. Based on the LRA, readers can assess financial performance, particularly through expenditure analysis. The expenditure realization at the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Cryptography of Cilegon City in 2021 was relatively low due to the post-COVID-19 recovery phase. In 2022, realization increased significantly due to the implementation of a regional priority program, namely the Smart City initiative. However, in 2023, expenditure realization declined again due to budget rationalization. This study aims to identify and analyze the expenditure performance in the Budget Realization Report (LRA) at the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Cryptography of Cilegon City for the fiscal years 2021-2023. This research uses a descriptive quantitative method. The data consists of primary sources derived from the audited Budget Realization Reports (LRA) for fiscal years 2021–2023 and interview results. The analysis techniques employed include: expenditure variance analysis, expenditure growth analysis, expenditure harmony analysis, and expenditure efficiency ratio analysis. The findings of this study show that the expenditure variance ratio is categorized as good, as the realization did not exceed the allocated budget. Expenditure growth was recorded at 21% in 2021, increased significantly to 59% in 2022, and declined to -9% in 2023. The expenditure harmony ratio indicates an average of 87.8% for operational expenditures and 12.14% for capital expenditures. The expenditure efficiency ratio fluctuated, with an average of 85.47%, which is still within the efficient category.

Keywords: *Expenditure performance analysis, Budget Realization Report, Financial Report*

Abstrak

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling utama. LRA ini merupakan jenis laporan keuangan yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis belanja. Realisasi belanja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon pada tahun 2021 masih cukup rendah karena masih dalam tahap pemulihan pasca covid 19, tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi karena adanya program prioritas daerah yaitu smart city, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan realisasi kembali akibat adanya rasionalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 -2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 – 2023 yang telah diaudit dan hasil wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasio varians belanja dikatakan baik karena realisasi belanja tidak melebihi total anggaran yang diberikan, pertumbuhan belanja pada tahun 2021 sebesar 21%, lalu mengalami kenaikan

yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 59% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 sebesar -9%. Hasil rasio keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dengan rata-rata sebesar 87,8% dan belanja modal dengan rata-rata sebesar 12,14%. Dan hasil rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan dengan rata-rata 85,47% dan masih dalam kategori efisien.

Kata kunci: Analisis kinerja belanja, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan

Introduction

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan aktivitas dan kinerja keuangan daerah selama satu periode anggaran. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran dan dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Anggaran merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian yang efektif dalam sebuah organisasi. Anggaran operasional biasanya berisi tentang proyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam satu periode. Dengan adanya anggaran, manajemen dapat menentukan efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi yang tercapai (Kewas dkk., 2024;229)

Penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas dan dapat mewujudkan transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat tercapai pemerintahan yang baik. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan untuk melaksanakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta memberikan penjelasan mengenai hasil dari segala jenis kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada publik atas dasar memenuhi hak-hak masyarakat.

Laporan Keuangan dalam Pemerintah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran didalamnya terdapat perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sedangkan catatan atas laporan keuangan itu berisi mengenai informasi tentang penjelasan dan keterangan secara rinci dalam pos-pos yang disajikan. (Chartady dkk., 2022;94)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling utama. LRA ini merupakan jenis laporan keuangan yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis belanja.

Pada penelitian ini, obyek penelitiannya adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon. Sebagai salah satu unit organisasi yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan untuk mengetahui dan menilai apakah anggaran didalamnya sudah terealisasi dengan baik atau tidak. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon juga harus melakukan efisiensi anggaran agar anggaran yang digunakan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan menghindari penggunaan anggaran yang tidak diperlukan. Dengan adanya LRA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban yang didalamnya menggambarkan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Chartady, Meifari, Wulandari dan Utami (2022) menunjukkan bahwa kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang menurun dari tahun sebelumnya. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Fatmayanti (2023) menunjukkan bahwa kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Kabupaten Aceh Barat hasil perhitungan dari varians belanja yang baik, pertumbuhan belanja yang positif, dan rasio efisiensi anggaran yang cukup efisien.

Literature Review

1. Kinerja Belanja

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. (Sarsiti, 2020:22)

Dengan kata lain, kinerja merupakan gambaran hasil kerja yang terwujud setelah melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam setiap kinerja memiliki tolak ukur, pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pencapaian yang objektif dan relevan sesuai dengan rencana dari program mengenai kinerja manajemen suatu lembaga. Data atau informasi kinerja tersebut akan berguna dalam proses pengambilan keputusan, perbaikan dari hasil pembangunan, manajemen pemerintahan, transparansi serta akuntabilitas

dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di masa depan.

Sedangkan belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dan program yang ada diwilayahnya. Belanja daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, pelayanan publik dan pemenuhan berbagai program yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penelitian ini menekankan pada analisis kinerja belanja daerah. Analisis kinerja belanja daerah merupakan alat yang penting bagi pemerintah untuk proses evaluasi dan sistem pengukuran dalam penilaian efektifitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 14, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), belanja modal, belanja lain-lain. (Chartady dkk.,2022; 95).

2. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Secara umum pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses evaluasi untuk menilai kinerja suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan hingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Manfaat pengukuran kinerja yaitu Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja, memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja, memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam

upaya memperbaiki kinerja organisasi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan, dan mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

3. Klasifikasi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Klasifikasi yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/tak terduga dan transfer keluar. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain / tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Transfer keluar yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Namun belanja daerah dalam APBD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja pemerintah daerah diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu Kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam struktur APBD, kelompok belanja langsung ini antara lain terdiri dari

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. (Fadillah Amin, 2019;22)

4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah disusun dan direncanakan dengan realisasi belanja serta pendapatan yang tercapai selama periode akuntansi. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa belanja dan pendapatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan setiap mata anggaran di APBN/D dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran berfungsi menyediakan informasi terkait sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi serta informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh untuk menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah dari segi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. (Luki dan Azas, 2023;40)

Dalam laporan realisasi anggaran umumnya terdapat beberapa elemen utama yaitu yang pertama anggaran yang direncanakan pada awal periode akuntansi, anggaran ini disusun berdasarkan proyeksi dan rencana kegiatan yang ingin dicapai. Kedua realisasi pendapatan yang didalamnya berisi jumlah pendapatan yang sebenarnya diterima selama periode tersebut termasuk pendapatan dari pajak, retribusi, hibah, dan sumber – sumber pendapatan lainnya. Ketiga realisasi belanja menunjukkan jumlah belanja yang sebenarnya dilakukan selama periode tersebut yang didalamnya mencakup belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya sesuai dengan kategori yang ditetapkan dalam anggaran. Keempat perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi pendapatan serta belanja. Ini membantu dalam menilai sejauh mana anggaran dapat direalisasikan dan mengidentifikasi perbedaan dan deviasi dari rencana awal. (Salomi, 2024;203)

5. Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi

(penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat tidak terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendak berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran.

Terdapat beberapa cara atau rumus yang digunakan untuk menganalisis kinerja belanja diantaranya yaitu analisis varians belanja yang digunakan untuk memberikan informasi perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Analisis pertumbuhan belanja yang berguna untuk mengetahui perkembangan belanja setiap tahunnya dan berapa besar pertumbuhan masing – masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis keserasian belanja berguna untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu analisis belanja operasi terhadap total belanja yang dapat memberikan informasi kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi setiap tahunnya dan analisis belanja modal terhadap total belanja yang memberikan informasi kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal setiap tahunnya. Rasio efisiensi anggaran yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Research Methods

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan suatu objek dengan apa adanya sesuai dengan kondisi yang terjadi ketika penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang – orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut peneliti yang utuh, komprehensif, dan holistic, dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan pengumpulan, analisis dan penafsiran terhadap data visual dan naratif (non numerik/angka-angka) secara keseluruhan dengan pandangan terhadap fenomena tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon tahun 2021 – 2023 yang telah di audit dan hasil wawancara (interview). Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak lain seperti buku, media online yang berkaitan dengan kinerja belanja daerah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu melakukan studi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, observasi dan studi pustaka sebagai bahan acuan dan data yang mendukung untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon yaitu:

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Selisih disukai (*favourable variance*) yaitu dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya. Dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*) yaitu dalam hal realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Berikut rumus analisis varians belanja :

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Sumber : Mahmudi (2019)

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing – masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut rumus analisis pertumbuhan belanja :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thnt} = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn t} - \text{Realisasi Belanja Thn t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn t-1}} \times 100$$

Sumber : Mahmudi (2019)

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) metode untuk menghitung analisis keserasian belanja, yaitu :

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Berikut rumus analisis belanja operasi terhadap total belanja :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thnt} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

Sumber : Mahmudi (2019)

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi

belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berikut rumus analisis belanja modal terhadap total belanja :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thnt} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

Sumber : Mahmudi (2019)

4. Rasio Efisiensi Anggaran

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Berikut rumus rasio efisiensi anggaran:

$$\text{Rasio Efisiensi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Result and Discussions

Hasil Penelitian

1. Analisis Varians Belanja

Tabel 1 Analisis Varians Belanja
Tahun Anggaran 2021 – 2023

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Kriteria	%	Proporsi
2021	14.676.955.481	18.484.737.652	(3.807.782.171)	Baik	20,6	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
2022	23.369.498.348	26.519.397.943	(3.149.899.595)	Baik	11,88	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
2023	21.185.394.416	23.577.215.698	(2.391.821.282)	Baik	10,14	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa selisih anggaran dan realisasi terbesar pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 3.807.782.171 atau sebesar 20,6%. Sedangkan selisih terkecil yaitu pada Tahun 2023 sebesar 10,14%. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui terdapat penurunan selisih anggaran dan realisasinya setiap tahunnya.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 2. Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2021 – 2023

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Belanja (%)	Ukuran
2020	12.070.486.569		
2021	14.676.955.481	21	Positif
2022	23.369.498.348	59	Positif
2023	21.185.394.416	-9	Negatif

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2021 pertumbuhan belanja menunjukkan hasil sebesar Rp 14.676.959.481 atau sebesar 21%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan pertumbuhan belanja yang signifikan yaitu sebesar Rp 23.369.498.348 atau sebesar 59%. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan pertumbuhan belanja sebesar Rp 21.185.394.416 atau sebesar -9% dari tahun sebelumnya.

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

**Tabel 3. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2021 – 2023**

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio (%)	Kriteria	Proporsi
2021	12.458.214.988	14.676.955.481	84,8	Seimbang	60% - 90%
2022	19.908.329.348	23.369.498.348	85,19	Seimbang	60% - 90%
2023	19.808.359.231	21.185.394.416	93,5	Tidak Seimbang	60% - 90%

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio belanja operasi tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 93% sedangkan rasio belanja operasi terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 84,8%.

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

**Tabel 4. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2021 – 2023**

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio (%)	Kriteria	Proporsi
2021	2.218.740.493	14.676.955.481	15,12	Seimbang	5% - 20%
2022	3.461.168.816	23.369.498.348	14,81	Seimbang	5% - 20%
2023	1.377.035.185	21.185.394.416	6,5	Seimbang	5% - 20%

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio belanja modal tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 15,12% sedangkan rasio belanja modal terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 6,5%.

4. Rasio Efisiensi Anggaran

Tabel 5. Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2021 – 2023

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Rasio (%)	Kriteria	Ukuran
2021	14.676.955.481	18.484.737.652	79,4	Efisien	<100%
2022	23.369.498.348	26.519.397.943	88	Efisien	<100%
2023	21.185.394.416	23.577.215.698	89	Efisien	<100%

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi belanja yang meningkat tiap tahunnya. Rasio efisiensi belanja tertinggi pada tahun 2023 sebesar 89%. Sedangkan untuk rasio terkecil pada Tahun 2021 yaitu sebesar 79,4%.

Pembahasan

1. Analisis Varians Belanja

Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon menghasilkan varians belanja sebesar – Rp 3.807.782.171 atau 20,6%. Pada tahun 2022 menghasilkan varians belanja sebesar -Rp 3.149.899.595 atau 11,88%. Sedangkan pada tahun 2023 menghasilkan varians belanja sebesar – Rp 2.391.821.282 atau 10,14%. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2021 terdapat penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19 dan anggaran yang diberikan masih cukup rendah (refocusing) Pemerintah Kota Cilegon masih memprioritaskan kesehatan untuk masyarakat. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Cilegon memberikan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan pelayanan publik contohnya yaitu pemasangan wifi di area publik agar dapat diakses bebas oleh masyarakat, pemasangan cctv di beberapa titik jalan kota dan desa serta pengembangan sistem website (PPID). Pada tahun 2023 terjadi rasionalisasi sehingga anggaran yang diberikan turun dari tahun sebelumnya dan anggaran digunakan untuk menjalankan dan melakukan pemeliharaan terhadap barang yang telah digunakan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun sebelumnya untuk pelayanan masyarakat.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon dari tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dan penurunan anggaran. Pada tahun 2021 tingkat persentase pertumbuhan belanja sebesar 21%. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Cilegon masih fokus dalam

penanganan kesehatan pasca covid 19. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan tingkat persentase pertumbuhan belanja sebesar 59% Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Cilegon memiliki program prioritas

Conclusion

1. Berdasarkan perhitungan analisis varians belanja pada tahun 2021 hingga 2023 kinerja belanja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon termasuk dalam kriteria baik karena realisasi belanja tidak melebihi total anggaran yang telah diberikan. Hal tersebut mengacu pada kriteria penilaian proporsi analisis varians belanja yaitu realisasi belanja lebih kecil.

Berdasarkan perhitungan analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2021 hingga 2023 kinerja belanja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon secara rinci pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan belanja sebesar 21% akibat masa pemulihan covid 19 sehingga terjadi penyesuaian untuk realokasi anggaran terhadap program prioritas daerah yaitu kesehatan masyarakat. dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 59% yang terjadi karena program prioritas daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kemajuan teknologi dan komunikasi kepada masyarakat, hal tersebut termasuk dalam kriteria positif karena kinerja belanja mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9% hal tersebut termasuk dalam kriteria negatif karena kinerja belanja mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon mengalami rasionalisasi oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang menyebabkan jumlah anggaran yang diberikan menurun, sehingga realisasi juga menurun menyesuaikan anggaran yang telah diberikan.

2. Berdasarkan perhitungan analisis keserasian belanja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon menunjukkan bahwa alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada belanja operasional, sementara porsi untuk belanja modal relatif kecil. Selama periode 2021 hingga 2023, rata-rata belanja operasional mencapai 87,8% sedangkan belanja modal berada pada kisaran 12,14% hal tersebut terjadi karena fungsi utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon yaitu pelayanan yang berfokus pada pengelolaan teknologi dan komunikasi bukan pembangunan fisik infrastruktur. Dan komposisi ini dinilai seimbang karena telah sesuai dengan standar proporsi dalam kriteria penilaian keserasian belanja.
3. Berdasarkan perhitungan analisis rasio efisiensi belanja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon pada tahun 2021 hingga 2023 secara umum termasuk kriteria efisien, dengan rata-rata 85,47% dan selama tiga tahun terakhir tidak ada hasil analisis rasio efisiensi

yang melebihi total anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara terkendali dan proporsional sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

4. Berdasarkan perhitungan analisis rasio efisiensi belanja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon pada tahun 2021 hingga 2023 secara umum termasuk kriteria efisien, dengan rata-rata 85,47% dan selama tiga tahun terakhir tidak ada hasil analisis rasio efisiensi yang melebihi total anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara terkendali dan proporsional sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

Acknowledgments

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, dapat disampaikan beberapa saran, antara lain :

1. Realisasi belanja tidak melebihi anggaran selama 2021–2023. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon disarankan untuk mempertahankan sistem perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah berjalan dengan baik. Namun, perlu ditingkatkan mekanisme monitoring berkala agar penyerapan anggaran tetap optimal dan tepat waktu.
2. Meskipun pertumbuhan belanja meningkat pada tahun 2021 dan 2022, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon tidak konsisten dalam melakukan realisasi belanja, untuk itu perlu melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan anggaran tahunan dengan lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan serta menjaga kesinambungan pertumbuhan belanja agar tidak fluktuatif, khususnya untuk program prioritas daerah.

Dengan rata-rata belanja operasi yang tinggi sebesar 87,8% dan belanja modal sebesar 12,14% menunjukkan dominasi pengeluaran rutin dibanding investasi pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan inovasi pada pelayanan public dan efisiensi pada belanja operasi yang kurang produktif.

3. Hasil rata-rata efisiensi kinerja belanja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon sebesar 85,47% sudah termasuk dalam kriteria efisien. Namun, tetap perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penganggaran dan pelaporan serta melakukan evaluasi kinerja secara periodik.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada satu instansi, tetapi juga membandingkan dengan dinas atau

instansi lain yang sejenis, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kinerja belanja pemerintah.

References

- Agusven, T. (2023). *Dasar Metodologi Penelitian*. CV Rey Media Grafika.
- Amelia, P. S., Nursyabani, D., & Brata, R. W. (2023). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021. *Jurnal Maneksi*, 12(1), 308-313. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1521>
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif dan Empiris*. UB Press, Malang.
- Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah dalam Konsep dan Analisis*. Deepublish, Yogyakarta.
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA). *Open Journal Systems*, 17(1), 93–100.
- Endah, P., & Priyono, N. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015 - 2019. *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(1), 24–38.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV IRDH, Malang.
- Fitri, R. H., & Fatmayanti, F. (2024). Optimalisasi Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.37641/jjakes.v12i1.2381>
- Hartoto. (2023). *Akuntansi Sektor Publik (Cetakan Pe)*. Widina Bhakti Persada.
- Hehanusa, S. J. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo.
- Karunia, L., & Mabur, A. (2023). *Akuntansi Pemerintahan Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Salemba Empat.
- Kewas, L. F., Tawas, Y., & Sumual, F. M. (2024). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(1), 228-236. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4727>
- Kusumaningrum, Y. G. I., Manafe, H. A., Bibiana, R. P., Manajemen, M., Katolik,

U., & Kupang, W. M. (2024). Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022. *Journal of Economics and Banking*, 6(1), 64-82.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Rahman, K. G. (2021). Good Governance dan Pengendalian Intenal pada Kinerja Pengelolaan Keuangan. Edu Publisher, Tasikmalaya.

Sarsiti. (2020). Akuntansi Sektor Publik. CV Green Publisher, Cirebon.